

LAPORAN KINERJA

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon
Tahun 2017



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
Ambon, Januari 2018

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon Tahun 2017 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini memuat tentang 1) Bab I Pendahuluan; 2) Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 3) Bab III Akuntabilitas Kinerja; 4) Bab IV Permasalahan; 5) Bab V Penutup dan Lampiran-lampiran.

Kami menyadari bahwa LAKIN Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu kami mengharapkan masukan dan koreksi dari semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan kedepan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan Laporan ini.

Ambon, Januari 2018

Kepala BBPPTP Ambon



Ir. Azwin Amir, MM

NIP. 196011301981031002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon Tahun 2017 ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon sebagaimana dimatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 10/Permentan/OT.140/2/2008 tanggal 06 Pebruari 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon dan sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam Penyusunannya mengacu pada Keputusan Kepala LAN No : 239/1A/6/8/2003, tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (Men-PAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Outputs atau sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan adalah :

- 1) Terlaksananya pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan.
- 2) Terlaksananya penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan
- 3) Terlaksananya pelayanan organisasi yang berkualitas.

Dalam Dokumen Penetapan Kinerja (PK) BBPPTP Ambon Tahun 2017 ditetapkan Indikator Kinerja dengan target sebagai berikut : Pelaksanaan Pengujian Mutu dan Sertifikasi benih Perkebunan dalam rangka Pemberian Sertifikat jumlah benih yang disertifikasi dengan target 250.000 batang dengan realisasi sebanyak 9.106.698 atau sebesar 364% benih bersertifikat/berlabel, dan Teknologi terapan perlindungan perkebunan sebanyak 12 paket dengan realisasi 100%.

Pagu alokasi anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 14.894.431.000, dan direvisi menjadi Rp. 15.144.431.000,- dikarenakan adanya penambahan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- untuk kegiatan persiapan Nursery. Realisasi penyerapan anggaran periode s/d Desember 2017 sebesar Rp. 14.471.201.093,- atau sebesar (95,56%).

Dana tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan utama sebagai berikut : realisasi pengembangan Desa Pertanian Organik berbasis komoditi Perkebunan sebesar (99,93%),

Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan sebesar (99,88%), Pengembangan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan sebesar (99,79%), Fasilitasi Teknis Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan sebesar (99,04%), Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (98,83%), Layanan Internal sebesar (99,12%), Layanan Perkantoran sebesar (93,57%)

Secara umum dalam pelaksanaan kegiatan BBPPTP Ambon Tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016, namun masih banyak ditemui kendala/hambatan, yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan antara lain kurangnya pemahaman petani dalam penggunaan benih unggul bersertifikat dan berlabel serta penerapan teknologi PHT dalam usaha perkebunan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut ditempuh berbagai upaya yang ditempuh diantaranya melakukan pembinaan teknis kepada petani, penangkar, serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pencapaian target sesuai dengan Renstra BBPPTP Ambon tahun 2015-2019.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
DAFTAR Gambar.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	5
2.1. Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Perkebunan	
2.1.1. Visi	5
2.1.2. Misi	5
2.1.3. Tujuan BBPPTP Ambon.....	6
2.1.4. Sasaran BBPPTP Ambon.....	8
2.1.5. Arah Kebijakan BBPPTP Ambon.....	8
2.1.6. Program BBPPTP Ambon.....	10
2.1.7. Fokus Kegiatan BBPPTP Ambon.....	11
2.1.8. Strategi BBPPTP Ambon.....	12
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017	
2.2.1. Perjanjian Kinerja.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1. Evaluasi Kinerja.....	14
3.2. Succes Story Pembangunan Perkebunan	
Tahun 2017.....	16
BAB IV PERMASALAHAN, UPAYA TINDAK LANJUT DAN	
RENCANA AKSI	40
4.1. Permasalahan.....	40
4.2. Isu Strategis Yang Perlu Ditindaklanjuti.....	46
BAB V PENTUTUP	49
5.1. Kesimpulan.....	49
5.2. Saran.....	49
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kegiatan dan Output BBPPTP AMBON Tahun 2016.....	11
Tabel 2	Rincian Realisasi Serapan Anggaran dan Output Kegiatan TA. 2016.....	14
Tabel 3	Capaian Kinerja BBPPTP Ambon.....	15
Tabel 4	Sertifikasi dan Pelabelan Benih layak Edar.....	16
Tabel 5	Pengujian Kemurnian Fisik, Kadar Air dan Daya Kecambah.....	17
Tabel 6	Rekapitulasi Pengujian Mutu APH.....	27
Tabel 7	CPCL TP Provinsi.....	37
Tabel 8	Realisasi tanam jagung di lahan perkebunan.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Capaian Kinerja Kegiatan Utama (Output).....	50
	Analisis Permasalahan Pelaksanaan Program/Kegiatan BBPPTP Ambon Tahun 2017.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ciri Khusus Kelapa Bido..... 18

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Areal perkebunan pada wilayah kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon (BBPPTP Ambon) yang meliputi Pulau Sulawesi, Kep. Maluku dan Papua, terdiri dari Perkebunan Rakyat \pm 93 % dengan melibatkan \pm 2,52 juta KK dan Perkebunan Besar \pm 7 %. Rata-rata perkebunan rakyat merupakan usaha yang diwariskan temurun-temurun, dibudidayakan secara tradisional, diusahakan skala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga petani, sedangkan perusahaan swasta/BUMN telah diusahakan dalam skala industri.

Salah satu persoalan utama yang dialami oleh perkebunan rakyat di Indonesia Timur adalah tingkat produktivitas riil rata-rata yang masih dari potensi, meskipun ada beberapa yang sudah mendekati potensi genetiknya yaitu di atas 85 %. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain penggunaan benih yang tidak memenuhi syarat, tanaman tua dan rusak, penanganan pasca panen yang belum sesuai standar konsumen dampak dari anomali iklim berupa kekeringan/kebakaran serta banjir juga berpengaruh terhadap kehilangan produksi akibat terganggunya proses metabolisme tanaman dan peningkatan serangan OPT. Menurunnya produktivitas hasil tanaman perkebunan disebabkan juga karena luas areal perkebunan yang diusahakan petani sangat terbatas, tenaga kerja yang dimiliki terbatas pada anggota keluarga,

umumnya pendapatan petani dari hasil perkebunan hanya merupakan usaha sampingan sehingga tidak ditekuni dengan baik, karena jenis usaha yang lain turut mendukung kebutuhan rumahtangga petani misalnya dibidang perikanan dan kehutanan.

Dalam upaya mendukung kegiatan peningkatan produksi dan mutu tanaman perkebunan diperhadapkan dengan kendala yakni kondisi pertanaman yang masih dibudidayakan secara tradisional dan tidak memenuhi syarat pertanaman yang baik, intensitas pemeliharaan rendah, usaha tani yang monokultur, sistem budidaya yang tidak optimal, kurang input teknologi baik dalam hal pemanfaatannya maupun aksesibilitasnya, adanya serangan OPT, dampak gangguan usaha perkebunan, belum terpenuhinya standar populasi tanaman per hektar dan didominasinya pertanaman oleh tanaman tua/rusak.

Meningkatnya kesadaran konsumen tentang produk ramah lingkungan membuka peluang terhadap naiknya permintaan sarana produksi yang bermutu dan berwawasan lingkungan seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran terhadap tuntutan efisiensi dan daya saing usaha perkebunan. Dunia usaha perbenihan perkebunan juga semakin berkembang dalam menghasilkan beragam produk benih yang memberikan hasil yang bermutu dan memiliki produktivitas yang baik. Teknologi yang menghasilkan produk pestisida organik/biopestisida juga makin mengemuka karena tuntutan konsumen akan produk ramah lingkungan.

Upaya meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan tidak lepas dari kondisi benih yang digunakan dan penggunaan sarana produksi lainnya seperti pupuk dan pestisida. Masalah benih tanaman perkebunan menjadi penting, mengingat komoditas tanaman perkebunan merupakan investasi jangka panjang pada periode relatif lama. Dengan demikian penggunaan benih unggul akan memberikan dampak yang baik terhadap budidaya tanaman dari resiko kerugian yang cukup tinggi. Untuk mencapai sasaran yaitu tersedianya benih unggul bermutu (tepat varietas, mutu, waktu, jumlah, lokasi dan harga) harus sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian No. 44 tahun 1995 tentang perbenihan tanaman, benih bina yang diedarkan harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Untuk menjamin mutu benih, produksi benih bina harus melalui "Sertifikasi". Dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman perkebunan telah ditetapkan bahwa sertifikasi harus dilakukan terhadap produksi benih, baik melalui perbanyakan vegetatif maupun generatif.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, kebijakan dan program Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon sesuai amanat Undang Undang No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan, maka diperlukan sistem akuntabilitas yang memadai. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) didasarkan

atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK).

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Perkebunan

2.1.1. Visi

Dalam rangka mendukung Visi Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” dan Visi Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 yaitu terwujudnya sistem pertanian bio-industry berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumber daya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani maka Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan Visi tahun 2015-2019 yaitu **“Menjadi Direktorat Jenderal yang profesional dalam mewujudkan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan pekebun dan memperkokoh fondasi sistem pertanian bio-industry berkelanjutan”**

2.1.2. Misi

Misi Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu :

1. Mewujudkan peningkatan produksi dan produktifitas tanaman semusim, tanaman tahunan dan tanaman rempah penyegar secara berkelanjutan.

2. Mewujudkan integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan kawasan
3. Mendorong upaya penerapan budidaya tanaman perkebunan dengan baik dan berwawasan lingkungan
4. Mendorong upaya pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani
5. Mewujudkan peningkatan teknologi dan penerapan pascapanen tanaman perkebunan secara berkelanjutan
6. Menyediakan fasilitasi bimbingan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan
7. Mewujudkan sistem perlindungan perkebunan dan penanganan dampak perubahan iklim yang terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan
8. Mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas dibidang manajemen dan kesekretariatan
9. Mewujudkan sistem pertanian bio-industry berbasis pengembangan komoditas perkebunan.

2.1.3. Tujuan

Dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas tanaman dan mutu produk perkebunan yang berdaya saing tinggi, maka tujuan penyelenggaraan BBPPTP Ambon sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pengawasan pelestarian plasma nutfah nasional sebagai sumber genetik dalam rangka penemuan varietas benih unggul.
- 2) Meningkatkan uji observasi, uji manfaat dan uji kelayakan benih dalam rangka pelepasan dan penarikan varietas.
- 3) Mengembangkan teknik dan metode pengujian mutu benih perkebunan dan uji acuan (*referee test*).
- 4) Meningkatkan ketersediaan data organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan dan musuh alaminya.
- 5) Meningkatkan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT dan non OPT serta faktor yang mempengaruhi.
- 6) Mengembangkan teknik dan metode *surveillance*, pengamatan, model peramalan, taksasi kehilangan hasil, dan teknik pengendalian OPT perkebunan.
- 7) Mengembangkan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas, pelepasan dan evaluasi agens hayati OPT perkebunan serta PHT.
- 8) Meningkatkan uji pemanfaatan pestisida.
- 9) Meningkatkan pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan.
- 10) Terwujudnya sistem manajemen informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan.

- 11) Meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan.
- 12) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait.
- 13) Meningkatkan pelayanan organisasi

2.1.4. Sasaran

Outputs atau sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan adalah :

- 4) Terlaksananya pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan.
- 5) Terlaksananya penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan
- 6) Terlaksananya pelayanan organisasi yang berkualitas.

2.1.5. Arah Kebijakan

Untuk melaksanakan visi, misi dan strategi pembangunan yang telah ditetapkan maka Kebijakan Umum BBPPTP Ambon adalah : “Memperkuat SDM dan fasilitas laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan serta fasilitas pendukung lainnya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan”. Kebijaksanaan dasar tersebut dijabarkan dalam kebijakan teknis yaitu :

- 1) Kebijakan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Perkebunan. Dimaksudkan untuk menjadikan SDM yang profesional sehingga mampu melaksanakan pelestarian danperkayaan sumberdaya genetik, pengembangan dan pengawasan mutu benih serta pengembangan dan pemanfaatan agensia hayati dalam penerapan PHT yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan petugas serta pendampingan bagi petani.
- 2) Kebijakan Pengembangan Kelembagaan. Kebijakan ini dalam rangka mewujudkan kelembagaan balai besar yang profesional dalam pengembangan perbenihan dan proteksi tanaman melalui pengembangan jejaring dan kerjasama dengan pihak terkait serta penguatan sarana dan prasarana balai besar.
- 3) Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, sehingga pelaksanaan pelestarian danperkayaan sumberdaya genetik, pengembangan dan pengawasan mutu benih serta pengembangan dan pemanfaatan agensia hayati dalam penerapan PHT dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup tersebut ditempuh upaya sebagai berikut :

- Meningkatkan kesadaran konsumen, produsen/pengedar benih dan pihak terkait terhadap pentingnya penggunaan benih bermutu.
 - Meningkatkan upaya penerapan teknologi ramah lingkungan pada kegiatan PHT.
 - Membantu upaya meningkatkan pengertian dan kesadaran untuk penerapan pengembangan PHT ramah lingkungan bagi petani.
- 4) Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi. Menyediakan pelayanan informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan yang akurat, tepat dan cepat bagi semua pihak yang membutuhkan. Dalam rangka pengembangan sistem informasi ini upaya yang ditempuh adalah sebagai berikut :
- Peningkatan kemampuan SDM dibidang pengelolaan sistem informasi.
 - Pengembangan dan pemantapan data base perbenihan dan proteksi.

2.1.6. Program

Program Utama BBPPTP Ambon mengacu kepada program Ditjen Perkebunan, yaitu Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan.

2.1.7. Fokus Kegiatan

Sebagai penjabaran program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan, maka BBPPTP Ambon melaksanakan kegiatan yaitu mengembangkan desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan, memfasilitasi kegiatan sertifikasi benih (jumlah benih yang bersertifikat dan berlabel), dan meningkatkan jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan, menyelenggarakan pelayanan organisasi yang berkualitas dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Kegiatan dan output BBPPTP Ambon Tahun 2017

No	Kode Nama Kegiatan	Output
1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan		
1	1779.003 Pengembangan Desa Pertanian Organik berbasis Komoditi Perkebunan	6 Desa
1781 Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan		
1	1781.001 Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan	250.000 batang
2	1781.002 Pengembangan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan	12 paket
3	1781.003 Fasilitasi Teknis Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi proteksi Tanaman Perkebunan	12 Paket
4	1781.950 Layanan Dukungan Manajelen Eselon I	12 Layanan
5	1781.951 Layanan Internal (Overhead)	1 Layanan
6	1781.994 Layanan Perkantoran	12 bulan

2.1.8. Strategi

Dengan memperhatikan kondisi dan keterbatasan yang ada maka strategi yang ditempuh adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM Balai antara lain melalui pelatihan, magang, dan studi banding serta rekrutmen tenaga fungsional sesuai kebutuhan.
- 2) Melengkapi sarana dan prasarana laboratorium, perpustakaan, dan media audio visual.
- 3) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam pengawasan dan pengembangan mutu benih serta pengendalian OPT.
- 4) Mengoptimalkan petugas fungsional POPT, PBT, dan PPNS perkebunan.
- 5) Pengembangan dan pemantapan informasi perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan.
- 6) Pengembangan jaringan dan kerjasama antar laboratorium pengujian mutu benih dan proteksi.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017

2.2.1 Perjanjian Kinerja Kegiatan Pembangunan Perkebunan 2017

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Terlaksananya Pemberian Pelayanan teknik, pengelolaan data dan informasi, dan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan laboratorium, serta pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium uji mutu benih dan proteksi tanaman perkebunan	1. Pengujian dan sertifikasi mutu benih tanaman perkebunan	250.000 batang
		2. Pengawasan kebun benih atau penangkar dan peredaran benih tanaman perkebunan	3 Kegiatan
		3. Koordinasi pelaksanaan dukungan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan	6 Kegiatan
		4. Pengamatan dan pemantauan OPT Tanaman Perkebunan	3 Kegiatan
		5. Pengembangan dan pemanfaatan agens pengendali hayati tanaman perkebunan	3 Jenis
		6. Rakitan Teknologi spesifik lokasi proteksi tanaman perkebunan	6 Paket teknologi
		7. Pengujian dan Analisa residu dan Pestisida atau Agens Pengendali Hayati Tanaman Perkebunan	8 Kegiatan
		8. Pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium proteksi dan pengujian mutu benih	2 Kegiatan
2.	Menurunnya luas areal yang terserang OPT dan terfasilitasinya pencegahan kebakaran lahan dan kebun, bencana alam, dampak perubahan iklim dan gangguan/konflik usaha perkebunan	1. Pembinaan dan serifikasi desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan	6 Desa

Kegiatan : Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon
 Anggaran Rp. 15.144.431.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Evaluasi Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pagu alokasi anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 14.894.431.000, dan direvisi menjadi Rp. 15.144.431.000,- dikarenakan adanya penambahan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- untuk kegiatan persiapan Nursery. Realisasi penyerapan anggaran periode s/d Desember 2017 sebesar Rp. 14.471.201.093,- atau sebesar (95,56%).

Tabel 2. Rincian Realisasi Serapan Anggaran dan Output Kegiatan TA. 2017

Kode	Uraian	Anggaran			Output/ Fisik (%)
		Pagu	Realisasi	%	
003	Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan	729.662.000	729.142.000	99,93	100
001	Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan	403.000.000	402.499.400	99,88	364
002	Pengembangan teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan	599.500.000	598.251.000	99,79	100
003	Fasilitasi Teknis Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan	407.420.000	403.500.000	99,04	100

Kode	Uraian	Anggaran			Output/ Fisik (%)
		Pagu	Realisasi	%	
950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1.904.142.000	1.881.955.580	98,83	100
951	Layanan Internal	1.250.000.000	1.238.000.000	99,12	100
994	Layanan Perkantoran	9.850.707.000	9.216.885.666	93,57	100

Posisi Desember 2017

Realisasi penyerapan anggaran 2017 sebesar Rp. 14.471.201.093,- atau sebesar (95,56%) bila dibandingkan dengan Realisasi pada tahun 2016 sebesar Rp. 21.743.057.181,- atau sebesar (93,67%) mengalami peningkatan sebesar 1,89%

Jumlah benih/bibit yang disertifikasi selama tahun 2017 ditargetkan 250.000 batang dan tersedia 12 paket teknologi terapan. Realisasi s.d bulan Desember 2017 adalah benih bersertifikat sebesar 9.106.698 (364%) dan paket teknologi terapan paket (100%).

Tabel 3. Capaian Kinerja BBPPTP Ambon

No	Kegiatan	Target dan Capaian	
		RKT/PK 2017	Realisasi 2017
1	2	3	4
1.	Jumlah benih yang disertifikasi	250.000	9.106.698
2.	Jumlah Teknologi Terapan perlindungan perkebunan (paket)	12	12

Posisi Desember 2017

Bila dibandingkan dengan tahun 2016 jumlah benih/bibit yang disertifikasi yaitu 6.395.047 pada tahun 2017 mengalami peningkatan 9.106.698 ini dikarenakan banyaknya permohonan sertifikasi serta meningkatnya pemahaman petani tentang pentingnya sertifikasi benih.

3.2 Success Story Pembangunan Perkebunan Tahun 2017

a. Penataan dan pengutuhan sarana prasarana kerja

Dalam rangka memfasilitasi pelayanan pada masyarakat telah dilaksanakan penataan dan pengutuhan sarana prasarana kerja berupa pengadaan meubuler kantor, pengadaan meubuler laboratorium, pengadaan jaringan internet, peralatan elektronik dan pengadaan alat pengolah data, pengadaan kendaraan bermotor, pengadaan sarana layanan

b. Pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi benih perkebunan dalam rangka pemberian sertifikat layak edar.

Sertifikasi dan pelabelan benih layak edar telah dilakukan sejumlah 9.106.698 benih yang memenuhi syarat, yang diperiksa oleh PBT di penangkar benih di wilayah kerja BBPPTP Ambon dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. Sertifikasi dan pelabelan benih layak edar

Tahun	Kelapa	Kakao	Pala	Cengkeh	Tebu	Jumlah per tahun
2010	-	1.045.048	-	-	-	1.045.048
2011	-	1.539.985	28.282	-	-	1.568.267
2012	40.000	938.881	247.521	-	-	1.226.402
2013	39.000	9.977	12.893	92.539	-	154.409
2014	208.036	-	177.710	-	-	385.746
2015	12.980	-	136.407	30.995	-	180.382
2016	-	-	142.421	306.468	5.946.158	6.395.047
2017	-	-	344.385	226.971	8.535.342	9.106.698
Jumlah	300.016	3.533.891	1.089.619	656.973	14.481.500	20.061.999

Posisi Desember 2017

- c. Pengujian Mutu Benih di Laboratorium dan Rumah Kaca
- Pengembangan teknik dan metode pengujian mutu benih tanaman perkebunan. Dalam rangka pengujian mutu benih telah dilaksanakan pengujian kemurnian fisik, kadar air dan daya kecambah jumlah sampel yang diuji sebanyak 31 sampel yang meliputi :

Tabel 5. Pengujian kemurnian fisik, kadar air dan daya kecambah

No.	Komoditi	2017			
		KF	KB	DB	KA
1.	Pala	-	-	4 kali	6 kali
2.	Cengkih	-	-	2 kali	8 kali
3.	Kakao	11 kali	-	11 kali	11 kali
4.	Kenaf	1 kali	-	1 kali	1 kali
5.	Wijen	1 kali	-	1 kali	1 kali
	Jumlah	13 kali	-	19 kali	27 kali

Beberapa kegiatan pengujian tahun 2017 dalam rangka pengembangan metode uji mutu benih dilaboratorium sebagai berikut :

1. Penetapan Kadar Air Benih Pala Metode Oven Suhu Rendah
 2. Penentuan Masak Fisiologis Benih Pala
 3. Standarisasi Pengujian Daya Berkecambah Pala
 4. Penetapan Kadar Air untuk Benih Cengkih
 5. Penentuan Masak Fisiologis Benih Cengkih
 6. Uji Daya Berkecambah Kakao dalam germintar standar
 7. Uji Viabilitas Benih Kakao
 8. Uji daya berkecambah benih pala dan cengkih unggul lokal
- d. Uji Observasi Klon Unggul Lokal
- Kegiatan observasi klon unggul tanaman perkebunan desa Bido dalam rangka pelepasan varietas pemerintah Kabupaten Pulau Morotai



Gambar 1. Ciri Khusus Kelapa Bido berbatang pendek, buah Bulat dan besar Jarak antara bekas daun sangat rapat

Kelapa Bido Morotai telah dilepas sebagai salah satu varietas unggul nasional sesuai Keputusan Menteri Pertanian No 637/Kpts/KB.010/10/2017 tanggal 10 Oktober 2017, tentang pelepasan varietas Bido sebagai varietas unggul.

e. Evaluasi dan Pemurnian Sumber Benih

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan sumber benih dan mempertahankan kemurnian sumber benih. Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pemurnian sumber benih tanaman perkebunan dilaksanakan pada bulan September s/d Desember 2017 di Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Fokus utama kegiatan evaluasi dan pemurnian sumber benih di tahun 2017 yaitu penetapan sumber benih dari blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih, yakni :

1. Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pemurnian sumber benih tanaman perkebunan telah dilaksanakan di 3 kabupaten di Provinsi Maluku yaitu di Kab. Maluku Tengah, Kab. Maluku Tenggara dan Kab. Maluku Tenggara Barat.
2. Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih yang telah dievaluasi dinyatakan layak untuk ditetapkan

sebagai sumber benih terdiri dari tanaman pala di Desa Rutah Kabupaten Maluku Tengah, cengkih di Desa Liliboi Kabupaten Maluku Tengah dan kelapa dalam di Desa Wafol, Desa Ohoi Fao Kabupaten Maluku Tenggara dan Desa Wowonda Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

- f. Pengawasan dan peredaran benih tanaman perkebunan
- Kegiatan ini bertujuan untuk :
- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pengawasan dan peredaran benih lintas provinsi adalah benih yang terjamin mutu dan kualitasnya;
 - b. Menginventarisasi peredaran benih tanaman perkebunan varietas unggul dan unggul lokal ilegal;

Pelaksanaan Kegiatan pengawasan peredaran benih di beberapa Kabupaten di Provinsi Maluku berlangsung pada bulan Januari sampai dengan Desember 2017.

Dari hasil kegiatan pengawasan peredaran benih lintas provinsi tahun 2017 pada komoditi pala sejumlah 224.639 benih dan berupa kecambah 104.985 berlabel dan 31.250 masih berupa benih belum berlabel, jadi total benih pala selama pengawasan yang ada di Provinsi Maluku sejumlah 255.889, sedangkan pada komoditi cengkih sejumlah 347.022 benih berlabel dan 860.400 belum berlabel, total benih cengkih 1.207.422, total keseluruhan benih pala dan

cengkih 1.463.311 benih, dari semua peredaran ada 111.046 benih dan kecambah yang keluar daerah melalui bandar udara Patimura.

- f. Kerjasama laboratorium uji mutu benih tanaman perkebunan dan uji mutu APH

Dalam tahun anggaran 2017, BBPPTP Ambon telah melaksanakan uji banding antara 7 laboratorium uji mutu benih tanaman perkebunan antar laboratorium uji mutu benih tanaman perkebunan dan 7 laboratorium uji mutu APH.

- g. Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu antara lain :

- 1) Kaji terap PHT pada tanaman kakao di wilayah kerja

Tujuan dilaksanakan kegiatan kaji terap PHT pada tanaman kakao yaitu untuk melakukan pengendalian penyakit busuk buah kakao dengan metabolit sekunder *Trichoderma* sp. Kegiatan dilakukan di Desa Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku Hasil kegiatan kaji terap PHT kakao tahun 2017 mendapatkan rekomendasi sebagai berikut :

1. Metabolit sekunder dari jamur *Trichoderma* sp. dapat mengendalikan penyakit busuk buah kakao dari intensitas serangan berat (>50%) menjadi ringan (<50%).
-

2. Metabolit sekunder dari jamur *Trichoderma* sp. hanya mampu mengurangi tingkat penurunan serangan penyakit busuk buah kakao sebesar 30,43% dan tingkat kerusakan tanaman hanya sebesar 8,22%.

2) Uji coba PHT pada tanaman cengkeh di Wilayah kerja Tujuan dilaksanakan kegiatan Uji Coba PHT pada tanaman cengkih dalam pengendalian hama penggerek adalah untuk mengetahui penggunaan metabolik sekunder Jamur *Beauveria bassiana* dan jamur *Metarhizium anisopliae* yang efektif dalam mengendalikan hama penggerek pada tanaman cengkih. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Salahutu, Desa Tulehu.

Hasil kegiatan ini yaitu penggabungan kedua jenis jamur yang dibuat dalam bentuk metabolik sekunder (*Metharizium anisopliae* dan *Beauveria Bassiana*) lebih efektif untuk menurunkan intensitas kerusakan akibat hama penggerek sebesar 0,47% (serangan pada bagian bawah), 0,36% (serangan pada bagian tengah) dan 0,28% (serangan pada bagian atas), jika dibandingkan dengan penggunaan metabolik sekunder secara tunggal, baik itu metabolik sekunder *Beauveria bassiana* ataupun *Metharizium anisopliae*.

3) Uji coba PHT pada tanaman kelapa di wilayah kerja

Kegiatan ini bertujuan untuk :

- a. Mengendalikan hama *Brontispa longissima* dengan pendekatan PHT yang berwawasan lingkungan melalui penggunaan agen pengendali hayati (APH) cair, pemupukan organik, dan sanitasi kebun
- b. Memperkenalkan metode infus akar untuk mengendalikan hama dengan menggunakan APH cair (metabolik sekunder *Metarhizium anisopliae* Var. *anisopliae* dan *Beauveria bassiana*).

Pendekatan PHT melalui perlakuan dengan APH cair *Metarhizium anisopliae*; *Beauveria bassiana*; *Metharhizium anisopliae* + *Beauveria bassiana* dapat menekan laju tingkat kerusakan kumbang janur (*Brontispa* sp) rata-rata sebesar 40,05% Dengan tingkat laju penurunan intensitas kerusakan tertinggi pada blok laju penurunan tertinggi pada blok WB sebesar 56,36% dan terendah pada blok LB 24,13%. Hal ini didukung juga dengan perlakuan sanitasi kebun; dan pemupukan organik yang keduanya bersifat ramah lingkungan.

4) Kaji Terap PHT untuk pengendalian OPT pala di wilayah kerja

Kegiatan Kaji Terap PHT kanker batang pala ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui

perlakuan yang tepat dan efektif dari jamur *Trichoderma* sp melalui cairan metabolite sekunder dan pemakaian arang tempurung pada batang tanaman pala yang terserang penyakit kanker batang pala.

Pelaksanaan Kegiatan Kaji Terap PHT terhadap penyakit kanker batang pala dilaksanakan di Desa Alang, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku

Dari metode perlakuan yang dilakukan untuk mengendalikan penyakit kanker batang pala (*Phytophthora*), arang tempurung masih mampu menekan serangan penyakit ini sampai dengan 96,74%, sedangkan metabolit sekunder hanya mampu < 96,74%. Arang tempurung masih efektif untuk mengendalikan penyakit kanker batang pala (*Phytophthora*).

5) Demplot PHT pada tanaman pala dan cengkih di Provinsi Maluku

Kegiatan demplot PHT pada tanaman pala dilaksanakan di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. Demplot Pengendalian hayati telah dilaksanakan dengan metode pemberian *Trichoderma* sp cair dengan cara infus akar, pemberian pupuk bokasi dan perlakuan sanitasi kebun. OPT sasaran yakni hama *Batocera hercules*, rayap dan busuk buah pada tanaman pala.

Hasilnya menunjukkan adanya perubahan terhadap laju tingkat serangan OPT.

Jika hal ini dapat diterapkan secara terus menerus oleh petani, maka dapat menurunkan tingkat serangan di lapangan.

- Sedangkan Demplot PHT pada tanaman cengkeh di dilaksanakan Desa Tulehu Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Metode yang digunakan adalah dengan pemberian APH Jamur *Beauveria bassiana* (*Metabolit Sekunder*), infus akar, sanitasi dan pemupukan.

hasilnya menunjukkan penurunan laju tingkat serangan penggerek pada tanaman cengkih.

Jika hal ini dapat diterapkan secara terus menerus oleh petani, maka dapat menurunkan tingkat serangan di lapangan.

- 6) Demplot PHT pada tanaman Kelapa di Provinsi Maluku di Desa Suli Kec. Salahutu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengendalikan hama *Oryctes* sp. dengan pendekatan PHT yang berwawasan lingkungan serta memperkenalkan metode pengendalian secara terpadu dengan menggunakan APH, perangkap feromon dan sanitasi kebun

7) Pengujian Aflatoksin pada Biji Pala

Pengujian Aflatoksin telah dilaksanakan di Laboratorium Pestisida BBPPTP Ambon sebanyak 37 sampel Provinsi Maluku. Kegiatan pengambilan sampel berlangsung secara internal dalam rangka uji coba alat dan metode serta peningkatan kompetensi analis dan laboran. Telah dilakukan validasi metode uji terhadap metode yang digunakan dengan menghasilkan beberapa rekomendasi terkait dengan pengembangan laboratorium.

Dari 30 sampel yang dianalisis 2 sampel terdeteksi mengandung aflatoksin B1, 2 sampel terdeteksi aflatoksin G1 dan 5 sampel terdeteksi aflatoksin B2, sedangkan untuk aflatoksin G2 semua sampel tidak terdeteksi. Penentuan analisis kandungan aflatoksin berdasarkan hasil kromatogram standar aflatoksin B1, G1, B2 dan G2. Standar nilai RT yang menjadi acuan pada analisis ini yaitu B1=13,647; G1=9,187; B2= 11,244 dan G2=7,724.

8) Pengujian Residu Pestisida

Pengujian residu pestisida telah dilaksanakan di Laboratorium Pestisida BBPPTP Ambon dengan sampel dari wilayah kerja. Pengujian residu pestisida bahan aktif deltametrin dan lamda silahotrin di Laboratorium Analisis Pestisida BBPPTP Ambon pada sampel biji lada dan

kakao yang diuji dengan menggunakan gas kromatografi.

9) Pengujian Mutu APH

Laboratorium BBPPTP Ambon telah melaksanakan pengujian mutu APH ruang lingkup pengujian viabilitas dan kerapatan spora sebagai berikut : *Trichoderma* 11 sampel yang bersertifikat, *Beauveria bassiana* 10 yang bersertifikat, dan *Metharizium* 13 sertifikat dari jumlah sampel masuk (Ruang lingkup) sebanyak 34 sampel.

Tabel 6. Rekapitulasi Pengujian Mutu APH

No	Jenis APH	Jumlah Sampel	Jenis Pengujian	Jumlah Pengujian
1	<i>Trichoderma sp</i>	11	Kerapatan spora dan Viabilitas spora	11
2	<i>Merharizium anisopliae</i>	13	Kerapatan spora dan Viabilitas spora	13
3	<i>Beauveria bassiana</i>	10	Kerapatan spora dan Viabilitas spora	10

10) Identifikasi dan koleksi OPT Penting di Laboratorium dan Lapangan.

Lokasi identifikasi dan koleksi OPT penting tanaman perkebunan dilaksanakan di Provinsi Maluku Utara Berdasarkan hasil identifikasi dan koleksi OPT tanaman perkebunan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Organisme pengganggu tumbuhan yang menyerang tanaman kakao di areal pertanaman di desa Ake Daya kecamatan Wasile Timur kabupaten Halmahera Timur di temukan hama penggerek buah kakao (*Conophomorpha cramerella*) dan penyakit busuk buah kering (*Colletotrichum gloesporioides*) sedangkan penyakit busuk buah kakao (*Phythoptora palmivora*), ditemukan didesa Ake Daya kecamatan wasile kabupaten Halmahera Timur dan desa Loce kecamatan Sahu Timur kabupaten Halmahera Barat provinsi Maluku Utara.
2. Organisme pengganggu tumbuhan yang menyerang tanaman kopi yaitu hama penggerek buah kopi (*Hypothenemus hampei*) yang ditemukan diareal pertanaman kopi di dusun Tebai desa Lolobata, kecamatan Wasile Tengah kabupaten Halmahera Timur provinsi Maluku Utara.
3. Organisme pengganggu tumbuhan yang menyerang tanaman cengkih di areal pertanaman adalah hama kutu penghisap daun/pucuk (*Coccus viridis*) dan *Nothopeus* sp serta penyakit kanker batang cengkih atau penyakit batang berdarah yang ditemukan didesa Buli Asal kecamatan Maba, kabupaten Halmahera Timur dan hama *Coptocercus* ditemukan di areal

tanaman cengkih di desa Sumaladaha kecamatan Kota Ternate provinsi Maluku Utara.

4. Organisme pengganggu tumbuhan yang menyerang tanaman pala yaitu hama penggulung daun (*Selenothrips*) ditemukan di desa Waka Jaya kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur dan di desa Loce kecamatan Sahu Timur kabupaten Halmahera Barat, Selain itu ditemukan hama *Batocera hercules* dan penyakit pecah buah mudah (*Colletotrichum gloesporioides*) serta penyakit busuk buah kering (*Stigmia myristica*) yang ditemukan di desa Loce kecamatan Sahu Timur kabupaten Halmahera Barat provinsi Maluku Utara.
5. Organisme pengganggu tumbuhan yang menyerang tanaman kelapa yaitu hama *Aspidiotus destructor* dan penyakit bercak cokelat (*Curvularia inaculaus* dan *Helminthosporium incurvatum*), serta penyakit bercak kelabu (*Pestalotia palmarum*) ditemukan didesa Waka Jaya kecamatan Wasile Timur kabupaten Halmahera Timur, Sedangkan hama *Aspidiotus destructor* ditemukan didesa Daka Ino kecamatan Wasile kabupaten Halmahera Timur. Hama *Sexava* sp, hama *Rhyncophorus* sp dan hama *Oryctes rhinoceros* ditemukan di desa Gurua kecamatan Wasile kabupaten Halmahera Timur sedangkan hama

Brontispa longissima dan *Pleisispa* sp ditemukan didesa Towara kecamatan Galela kabupaten Halmahera Utara provinsi Maluku Utara.

6. Organisme pengganggu tumbuhan yang menyerang tanaman tebu yaitu hama kutu bulu putih (*C. lamigera*) dan hama penggerek batang tebu (*Chilo sacchariphagus*) ditemukan di desa Daka Ino kecamatan Wasile kabupaten Halmahera Timur provinsi Maluku Utara.
7. Koleksi basah berjumlah 33 buah koleksi, Koleksi disimpan di Laboratorium Entomologi.

11) Analisa GUP dan Inventarisasi DPI

Dalam tahun 2017 telah dilakukan inventarisasi data GUP non OPT di Provinsi Maluku dan Maluku Utara yang selanjutnya membuat rekomendasi antisipasi serta pengendaliannya ke Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi/Kab/Kota.

12) Pemberian pelayanan teknik kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan.

Pelayanan teknis kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan diselenggarakan dalam bentuk pemberian pelayanan bagi petani, petugas Dinas provinsi/kabupaten/kota, instansi terkait. Salah satunya petugas POPT/PBT

sebagai nara sumber pada kegiatan pelatihan atau aplikasi di lapangan yang dilakukan oleh dinas yang membidangi perkebunan. Beberapa rekomendasi pengendalian OPT di lapangan diterbitkan oleh BBPPTP Ambon. Selain itu dalam proses pengadaan peralatan laboratorium APH di Dinas yang membidangi perkebunan di wilayah kerja, BBPPTP Ambon diminta sebagai tim teknis.

- 13) Pengelolaan data dan Informasi Proteksi dan Benih
Informasi mengenai benih dan proteksi tanaman perkebunan dapat diakses melalui website www.ditjenbun.deptan.go.id/bbpptpambon/ untuk komunikasi dapat melalui telp/fax : 0911-361203/361325 atau email bbp2tp_ambon@yahoo.com. Telah diterbitkan buletin Rempah sebagai media informasi bagi pemangku kepentingan yang terkait dan bagi pihak yang membutuhkan. Secara reguler petugas POPT, PBT dan PMHP menulis siaran pedesaan yang disiarkan oleh RRI. Selain itu dibuat leaflet, brosur, buku petunjuk mengenai benih dan proteksi untuk petugas dan petani serta pemangku kepentingan yang lain.

14) Akreditasi laboratorium benih dan proteksi

Dalam tahun 2017 Laboratorium BBPPTP Ambon melaksanakan kegiatan Surveillance dari KAN dengan penambahan ruang lingkup yaitu Aflatoksin dan uji Kadar air benih pala dan cengkeh. Ruang lingkup kegiatan laboratorium yang terakreditasi adalah :

a. Laboratorium benih, bidang pengujian fisika/biologi :

- Uji kadar air benih (% berat) kakao
- Uji daya berkecambah benih (% jumlah) kakao, pala dan cengkeh
- Uji kemurnian fisik benih (% berat) kakao

b. Laboratorium proteksi, bidang pengujian biologi :

- Uji viabilitas (% jumlah) jamur *Metarhizium anisopliae*, jamur *Trichoderma* spp, jamur *Beauveria bassiana*
- Uji kerapatan spora (Jumlah spora/ml) jamur *Metarhizium anisopliae*, jamur *Trichoderma* sp, jamur *Beauveria bassiana*

15) Pengembangan Metode Uji Mutu APH sebanyak 9 SOP diantaranya :

1. SOP uji daya hambat metabolit sekunder
 2. SOP uji sensitivitas
 3. SOP uji keamanan hayati
 4. SOP Uji Hormon
 5. SOP penghitungan spora
-

6. SOP Viabilitas
7. SOP Uji metabolit sekunder dan patogen pada tanaman sehat
8. SOP uji metabolit sekunder pada tanaman sakit
9. SOP uji patogen

Pengembangan uji antagonis menghasilkan 3 SOP diantaranya :

1. SOP uji antibiosis
2. SOP uji Kompetisi
3. SOP Micoparasit/Hiperparasit

Pengembangan uji efikasi menghasilkan 10 SOP diantaranya:

1. SOP efikasi metabolit sekunder hama penggerek dengan cara infus batang
2. SOP efikasi metabolik sekunder hama penggerek dengan cara infus akar
3. SOP efikasi metabolit sekunder hama penghisap dengan cara infus batang
4. SOP efikasi metabolik sekunder hama penghisap dengan cara infus akar
5. SOP efikasi metabolit sekunder penyakit benih
6. SOP efikasi metabolik sekunder penyakit pembuluh dengan cara infus batang
7. SOP efikasi metabolik sekunder penyakit pembuluh dengan cara infus akar

8. SOP efikasi metabolik sekunder penyakit pembuluh
9. SOP efikasi metabolik sekunder penyakit pasca panen
10. SOP efikasi metabolik sekunder penyakit pasca panen non pembuluh

16) Pengembangan Desa Pertanian Organik berbasis Komoditi Perkebunan

Kegiatan pengembangan desa pertanian organik tahun 2017 yang dilaksanakan diantaranya :

- a. Penyaluran bantuan berupa mesin potong rumput dan profil tank
- b. Pelatihan sistem pertanian organik

Pelatihan system pertanian organik dilaksanakan di 6 desa organik selama 6 hari, mulai dari tanggal 28 Maret s.d 03 April 2017 Nara sumber berasal dari PT. BioCert Indonesia. Kegiatan pelatihan dilaksanakan dengan materi antara lain Standar Pertanian Organik, Kesuburan Tanah dan Pengendalian OPT, Internal Control System (ICS) dan Doksistu Kelembagaan dan SMI. Dalam pelaksanaannya kelompok tani dapat menerima dengan baik sehingga terjadi interaksi antara pemateri dengan kelompok dalam pelatihan. Atas kesepakatan dalam pelatihan tentang ICS telah dibentuk kepengurusan yang nantinya dapat melakukan tugas dengan baik setelah kebun pala

pada waktunya akan disertifikasi sebagai pala organik.

c. Pendampingan persiapan

Pendampingan petani mengenai system pertanian organik dilaksanakan di 6 desa organik selama 15 hari, mulai dari tanggal 05 s.d 20 Juni 2017 Nara sumber berasal dari PT. BioCert Indonesia. Materi pendampingan berupa persiapan sertifikasi kebun pala.

d. Pra asesmen dalam rangka sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi pala

Pelaksanaan kegiatan organik berbasis komoditi perkebunan telah berjalan sampai pada tahap memasuki pra asesmen sehingga semua kelompok tani telah dipersiapkan dalam rangka penandatanganan Letter Of Intens (LoI) yang akan membangun kerja sama dengan berbagai elemen yang berkepentingan sehingga sangat perlu membuat satu kesepakatan bersama di antara kelompok ICS dan para infestor yang pada sarannya adalah komoditi organik khususnya tanaman Pala.

Kegiatan ini merupakan lanjutan tahapan kegiatan sebelumnya dari pihak PT.Biocert Indonesia untuk menilai kesiapan petani dalam mengelola dokumen dan admistrasi dalam rangka penilaian serta untuk memberikan jaminan bahwa produk organik

memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam standar dan dokumen normatif lainnya melalui kegiatan assesmen kesesuaian dokumen standar SNI organik yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Organik dalam hal ini adalah PT. Biocert Indonesia.

e. Pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan

Pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan dilaksanakan oleh tim kerja organik BBPPTP Ambon, meliputi :

1. Pemeliharaan ternak, kelanjutan penanaman palawija dan hijauan ternak
2. Pembinaan terhadap pemeliharaan kebun, penggunaan input produksi, panen, dan penanganan pasca panen serta penguatan kelembagaan petani diantaranya :
 - Penandatanganan MOU
 - Workshop GAP Perkebunan Pala dan Soft Launching Desa Agrowisata Pala Banda menuju organik
3. Monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan, pendampingan dan pra asesmen.
Monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan secara berkala oleh BBPPTP Ambon pada saat kegiatan pelatihan, pendampingan dan

praassesmen. Hal ini dilakukan untuk memastikan pekerjaan berjalan dengan lancar.

17) Integrasi Jagung

Calon petani penerima bantuan dan calon lokasi lahan yang akan ditanami jagung pada kegiatan jagung dilahan perkebunan di provinsi Maluku tahun 2017 yang diusulkan ke Direktur Jenderal Perkebunan seluas 16.000 ha. Data CPCL TP Provinsi sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Nomor : 050/565/2017 tanggal 10 April 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. CPCL TP Provinsi

No	Kab/Kota	Luas Lahan
1	Buru Selatan	413
2	MTB	845
3	MBD	454
4	Maluku Tenggara	333
5	Kep. Aru	400
	Jumlah TP Provinsi	2445

Laporan pelaksanaan kegiatan Integrasi Jagung di Lahan Perkebunan tahun 2017 yang diperoleh dari masing-masing Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Realisasi tanam jagung di lahan perkebunan

No.	Kab/Kota	Realisasi (ha)	
		Program	Swadaya
1	Buru Selatan	157	801
2	MTB	0	700
3	MBD	0	0
4	Maluku Tenggara	358	0
5	Kep. Aru	400	400
6	Maluku Tengah	0	30
7	SBB	235	0
8	SBT	500	0
9	Buru	700	252
10	Ambon	0	50
11	Tual	0	50
	Jumlah	2.350	2283
	Total	4.633	

18) Persiapan Nursery Modern

Dalam tahun 2017, telah dilaksanakan persiapan pembangunan nursery di 2 kabupaten di provinsi Maluku Utara yakni kota Tidore dan kota ternate.

Pembangunan nursery modern direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2018 yang berlokasi di BPT Soasiu di Kota Tidore Kepulauan dan di LUPH Kota Ternate

Komoditi yang akan dikembangkan dalam nursery modern telah disepakati yakni komoditi rempah. Prototype atau

bentuk nursery dan kebun persemaian dilengkapi dengan laboratorium, kantor dan sarana pendukung lainnya, dukungan dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang akan mengelola nursery, serta regulasi yang diperlukan untuk pembangunan nursery

19) Membangun Jejaring dan Kerjasama

Telah dilakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi Unpatti dengan merekrut tenaga praktisi pendamping yaitu Dr. Ir. I. Marzuki M.Si untuk bidang perbenihan tanaman perkebunan dari Ir. H.R.D. Amanupunyo, MP untuk bidang proteksi.

Selain itu beberapa dosen senior dari Unsoed Purwokerto (Prof. D. Ir. Leokas Soetanto, P.Hd, UGM Yogyakarta (Dr. Suputa,SP,MP) dan beberapa dosen senior IPB Bandung juga terlibat dalam beberapa kegiatan BBPPTP Ambon sebagai nara sumber.

3.3 Permasalahan

1. Penambahan tupoksi uji residu pestisida, logam berat dan kandungan aflatoksin.

Dalam tahun 2017, BBPPTP Ambon telah melakukan pengujian kandungan aflatoksin pada biji pala dan kandungan residu pestisida deltametrin pada lada. Tenaga fungsional PMHP yang melaksanakan pengujian berjumlah 3 orang, terdiri dari 1 orang PMHP Ahli muda dan 2 orang

PMHP trampil pelaksana. Kendala yang dihadapi adalah sampai dengan saat ini, tugas fungsi BBPPTP Ambon untuk melaksanakan pengujian tersebut diatas belum diatur dalam Permentan No. 10 Tahun 2008 tentang organisasi dan tatakerja BBPPTP Ambon.

Pengujian kandungan aflatoksin dan residu pestisida yang dilaksanakan oleh laboratorium pestisida berawal dari kebutuhan daerah terkait dengan adanya penolakan pembeli dari negara-negara di Eropa karena adanya kandungan aflatoksin yang melebihi ambang batas yang disyaratkan. Disamping itu tidak tersedianya laboratorium penguji yang terakreditasi untuk melaksanakan pengujian tersebut di

provinsi Maluku. Akhirnya berawal dari serangkaian asesmen oleh Direktorat PPHP dan Dinas Pertanian provinsi Maluku maka dipilihlah laboratorium BBPPTP Ambon untuk melaksanakan pengujian kandungan aflatoksin pada biji pala.

Berdasarkan tuntutan konsumen terhadap pengujian kandungan residu pestisida, dan aflatoksin maka kedepan perlu adanya penambahan tugas dan fungsi BBPPTP Ambon di bidang pengujian tersebut.

2. Adopsi teknologi

Partisipasi petani masih kurang dalam mengadopsi teknologi pengendalian hama terpadu yang diterapkan oleh POPT. Hal ini terlihat dari tingginya intensitas serangan OPT akibat tidak dilaksanakannya sanitasi, pemupukan, pengendalian OPT, dan pemangkasan. Di lain pihak, perhatian terhadap usaha tani perkebunan masih belum maksimal karena petani memiliki mata pencaharian yang lain selain berkebun.

Petani lebih cenderung melihat hasil dari pada mengikuti proses, mengakibatkan lambatnya adaptasi teknologi tersebut.

3. Biaya operasional pengelolaan laboratorium benih dan proteksi

Seiring dengan meningkatnya jumlah dan jenis pengujian di laboratorium benih dan proteksi, maka biaya operasional pengujian makin meningkat. Alokasi biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengujian harus mengimbangi setoran PNBP. Perolehan PNBP berasal dari pengujian dan sertifikasi mutu benih, pengujian mutu APH dan pengujian kandungan aflatoksin. Masih rendahnya PNBP karena pengujian aflatoksin, residu pestisida, pengujian mutu APH dan pengujian mutu benih di laboratorium masih bersifat internal, sampel yang diambil oleh petugas untuk kepentingan pengembangan metode uji belum mencakup pelanggan eksternal.

4. Pengawasan peredaran benih lintas provinsi

Masih kurangnya respons produsen benih terhadap hasil sosialisasi peraturan perbenihan dan teknis pembibitan sesuai standar yang pernah dilaksanakan sehingga terlihat kegiatan produsen benih dibuat masih belum sesuai standar SNI; Pembibitan dibiarkan terbengkalai tidak terurus karena produsen kecewa terhadap pelaksanaan proyek-proyek pembibitan yang tidak mengakomodir hasil pembibitan mereka seperti janji awal sebelum dilakukan pembibitan; Pohon Induk yang digunakan sebagai sumber benih belum bersertifikat, sumber benih berasal dari benih unggul lokal yang menurut petani memiliki produksi tinggi; Rata-rata produsen belum memiliki ijin usaha produksi; Masih banyaknya masyarakat/petani belum memahami tentang mutu dan kualitas benih sehingga masih banyak benih yang beredar di masyarakat, benih yang tidak bermutu dan berkualitas. Terdapatnya peredaran benih yang tidak sesuai dengan standart mutu namun telah dilakukan pelabelan oleh instansi yang tidak berwenang.

Kegiatan PPNS di berbagai pintu keluar masuk benih di pulau Ambon, menunjukkan bahwa benih yang beredar masih banyak yang belum memiliki dokumen lengkap. Untuk meningkatkan penggunaan benih yang bermutu, bersertifikat dan berlabel, tindakan perbaikan dengan cara memberikan pemahaman kepada produsen agar menggunakan benih

yang terjamin mutunya, selain itu masalah yang dihadapi adalah Kegiatan UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih setempat yang membidangi perkebunan tidak sinkron/sinergis dengan UPT Pusat.

5. Produsen benih

Masih maraknya penangkar benih musimam yang tidak memiliki Ijin Produksi Benih, kemampuan teknis dalam memproduksi benih terbatas, kurang paham mengenai aturan perbenihan. Kedepan pembinaan dan sosialisasi aturan perbenihan pada penangkar dan instansi terkait lainnya tetap dilaksanakan.

6. Kebun sumber benih

Penerapan Permetan No. 50 tahun 2015, yang mengatur penetapan sumber benih oleh Direktur Jenderal Perkebunan belum diantisipasi dengan baik oleh daerah, sehingga masih banyak kebun sumber benih berupa Kebun Induk, Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk terpilih yang belum ditetapkan sebagai sumber benih. Kedepan akan menjadi masalah dalam proses sertifikasi karena keberadaan sumber benih belum jelas.

Dalam tahun anggaran 2017, BBPPTP Ambon telah memfasilitasi penilaian dan pengusulan penetapan sumber benih pala sebanyak 12 kebun dan cengkih sebanyak 1 kebun.

Hal ini perlu ditindaklanjuti segera oleh Dinas yang membidangi perkebunan untuk mengusulkan kebun sumber benih agar dinilai dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan.

7. Pengelolaan database proteksi dan benih

Tingkat pemahaman petugas pengamat dalam melakukan pendataan, pengolahan, pelaporan data OPT belum maksimal, tenaga pengamat tidak tersedia di semua lokasi kabupaten/kota oleh karena pemekaran wilayah, jangkauan wilayah pengamatan tidak sebanding dengan jumlah petugas di lapangan, disamping itu faktor usia tenaga pengamat yang dalam lima tahun ke depan memasuki batas usia pensiun.

Hal ini mengakibatkan distribusi pengiriman data pengamatan OPT belum sesuai jadwal yang ditentukan, pengolahan data dan pelaporan mengalami keterlambatan. Pengelolaan database perbenihan belum terlaksana dengan baik, mekanisme yang dibangun untuk mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan perbenihan di wilayah kerja belum diatur. Hal ini mengakibatkan data terkini mengenai kebun induk, blok penghasil tinggi, pohon induk terpilih, produsen benih, jalur peredaran benih tidak mudah diperoleh.

8. Pengembangan desa organik berbasis komoditi perkebunan
Tingkat pengetahuan dan pemahaman petani dalam menghasilkan sarana produksi berupa pupuk dan APH untuk pengendalian OPT secara mandiri masih belum optimal. Kebiasaan menerima bantuan secara gratis dari pemerintah mengakibatkan sulitnya membiasakan petani memproduksi sendiri sarana produksi.

Pemeliharaan ternak dalam kandang koloni tidak biasa dilakukan oleh petani, hal ini mengakibatkan tingginya tingkat mortalitas hewan peliharaan. Perlu kerja keras untuk merubah kebiasaan petani dalam memelihara ternak dan memproduksi saprodi secara mandiri.

3.4 Isue Strategis Yang Perlu Ditindaklanjuti

a. Akreditasi Laboratorium

Kedepan tuntutan konsumen terhadap kualitas produk perkebunan yang di ekspor akan semakin ketat. Untuk mendukung hasil pengujian laboratorium yang diakui secara internasional apabila terjadi tuntutan/klaim dari konsumen, laboratorium penguji yang terakreditasi menjadi salah satu persyaratan yang diperlukan. Untuk itu upaya balai untuk penambahan ruang lingkup akreditasi khususnya untuk pengujian residu pestisida, uji kandungan aflatoksin, dan uji mutu APH cair perlu didukung penyelesaiannya.

b. Penguatan SDM.

Sumberdaya manusia untuk menunjang tugas dan fungsi masih belum memadai, yaitu masih terbatasnya petugas Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Pengendali OPT, Tenaga Laboran, Petugas Pengambil Contoh. Kedepan perlu diusulkan untuk penambahan tenaga teknis POPT, PBT, PMHP dan PPC, tenaga laboran, serta tenaga pengamat di lapangan.

c. Pengelolaan data base

Mekanisme pengelolaan database benih dan proteksi perlu ditingkatkan untuk menjamin ketersediaan data yang akurat, tepat waktu, valid dan dapat dipercaya serta memudahkan pemangku kepentingan mengakses data lebih cepat dalam proses pengambilan keputusan.

d. Adopsi teknologi proteksi tanaman perkebunan

Kedepan diharapkan kegiatan kajian dapat menghasilkan teknologi terapan pengendalian OPT ramah lingkungan, biaya rendah dan mudah diaplikasikan di tingkat petani. Salah satu cara untuk menerapkan hal tersebut dengan membangun lebih banyak demplot PHT untuk pengendalian OPT.

e. Pembiayaan operasional laboratorium

Penerimaan PNBP dari pengujian laboratorium dan sertifikasi benih tanaman perkebunan perlu ditingkatkan dengan menjangkau lebih banyak pelanggan eksternal. BBPPTP Ambon perlu meningkatkan promosi mengenai jenis pengujian di laboratorium. Dengan demikian diharapkan biaya operasional laboratorium dapat dibantu dari pengelolaan penerimaan PNBP.

f. Benih bersertifikat dan berlabel.

Pengawasan terhadap benih bersertifikat dan berlabel perlu ditingkatkan dengan mengurangi peredaran benih yang ilegal, meningkatkan jumlah produsen benih yang memiliki ijin produksi benih, meningkatkan jumlah kebun sumber benih (KI,BPT,PIT) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan. Diharapkan tugas PPNS tidak sebatas peninjauan saja tetapi perlu kerjasama dengan membuat pos penjagaan demi menghindari proses peredaran benih tanaman perkebunan yang legal maupun ilegal sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Dilain pihak perlu diberlakukan sanksi yang tegas bagi pelaku yang melanggar peraturan perbenihan perkebunan, perlu membangun kerjasama dengan instansi terkait yang berada di wilayah kerja agar bisa mencegah peredaran

benih palsu dan perlunya dibangun pos penjagaan di daerah yang sering terjadi peredaran dan guna memperancar proses penyidikan perlu dibuat format berita acara sebagai pegangan bagi petugas bila kedatangan keganjalan dalam proses peredaran benih

- g. Pengembangan desa organik berbasis komoditi perkebunan

Meningkatkan pembinaan, monitoring dan evaluasi ke desa organik, melakukan pendekatan persuasif ke kelompok tani sasaran untuk memproduksi sendiri saprodi.

**ANALISIS PERMASALAHAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
BBPPTP Ambon Tahun 2017**

NO	PERMASALAHAN	PENYEBAB	DAMPAK	UPAYA YG DILAKUKAN	SARAN REKOMENDASI	PENANGGUNG JAWAB
1.	Belum adanya Penambahan tupoksi uji residu pestisida, logam berat dan kandungan aflatoxin	belum diatur dalam Permentan No. 10 Tahun 2008 tentang organisasi dan tatakerja BBPPTP Ambon	Pelaksanaan Kegiatan Mengalami kendala	Menambah Tupoksi BBPPTP Ambon khususnya Uji residu pestisida, logam berat dan kandungan aflatoxin	Revisi Permentan No 10 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja BBPPTP Ambon	Kepala BBPPTP Ambon
2.	Perhatian petani terhadap usaha tani perkebunan masih belum maksimal karena petani memiliki mata pencaharian yang lain selain berkebun	petani masih kurang dalam mengadopsi teknologi pengendalian hama terpadu yang diterapkan oleh POPT	Tingginya intensitas serangan OPT	diharapkan kegiatan kajian dapat menghasilkan teknologi terapan pengendalian OPT ramah lingkungan, biaya rendah dan mudah diaplikasikan di tingkat petani	Demplot PHT	Kepala BBPPTP Ambon
3.	rendahnya tingkat pemahaman petani terhadap pentingnya penggunaan benih yang bersertifikat dan berlabel	Masih dijumpai di lapangan benih yang beredar belum bersertifikat dan berlabel	Penggunaan benih yang belum bersertifikat dan berlabel masih tinggi	Koordinasi yang dibangun untuk pengawasan peredaran benih sampai dengan tahun 2016, masih meliputi korwas PPNS, Dinas yang membidangi perkebunan tingkat kabupaten/kota dan Pengawas Benih Tanaman.	perlu adanya koordinasi pengawasan peredaran dengan instansi terkait seperti Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat kabupaten/kota, pengawas benih tanaman, korwas PPNS, aparat keamanan di tingkat desa sampai dengan provinsi, dan petugas Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan serta petugas Karantina Pertanian	Kepala Bidang Perbenihan dan proteksi, Kepala Seksi Perbenihan
4.	Masih maraknya penangkar benih musimam yang tidak memiliki Ijin Produksi Benih, kemampuan teknis dalam memproduksi benih terbatas	Penangkar belum memahami tentang aturan perbenihan	Beredarnya benih yang tidak bersertifikat dan berlabel	Sosialisasi dan pembinaan dan sosialisasi aturan perbenihan pada penangkar dan instansi terkait	Koordinasi dengan instansi terkait	Kepala BBPPTP Ambon
5.	masih banyak kebun sumber benih berupa Kebun Induk, Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk terpilih yang belum ditetapkan sebagai sumber benih	Penerapan Permetan No. 50 tahun 2015, yang mengatur penetapan sumber benih oleh Direktur Jenderal Perkebunan belum diantisipasi dengan baik oleh daerah,	Menyebabkan masalah dalam proses sertifikasi karena keberadaan sumber benih belum jelas	Dalam tahun anggaran 2016, BBPPTP Ambon telah memfasilitasi penilaian dan pengusulan penetapan sumber benih pala sebanyak 2 kebun dan kelapa sebanyak 22 kebun.	Hal ini perlu ditindaklanjuti segera oleh Dinas yang membidangi perkebunan untuk mengusulkan kebun sumber benih agar dinilai dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan	Kepala Bidang Perbenihan dan Proteksi
6.	Pengelolaan database perbenihan belum terlaksana dengan baik, mekanisme yang dibangun untuk mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan perbenihan di wilayah kerja belum diatur	Tingkat pemahaman petugas pengamat dalam melakukan pendataan, pengolahan, pelaporan data OPT belum maksimal, tenaga pengamat tidak tersedia di semua lokasi kabupaten/kota oleh karena pemekaran wilayah, jangkuan wilayah pengamatan tidak sebanding dengan jumlah petugas di lapangan, disamping itu faktor usia tenaga pengamat yang dalam lima tahun ke depan memasuki batas usia pensiun	Hal ini mengakibatkan distribusi pengiriman data pengamatan OPT belum sesuai jadwal yang ditentukan, pengolahan data dan pelaporan mengalami keterlambatan	Penataan Database	-	Kepala Bidang Perbenihan dan Proteksi, Kepala Seksi Perbenihan, Kepala Seksi Proteksi
7	Pemeliharaan ternak dalam kandang koloni tidak biasa dilakukan oleh petani	tingginya tingkat mortalitas hewan peliharaan.	Produksi pupuk kompos rendah	Memberikan pemahaman petani tentang pemeliharaan ternak dan menyusun resiko kegiatan dan penanganan pemeliharaan ternak		Tim pelaksana Desa Pertanian Organik dan Kelompok Tani

B. Realisasi Anggaran

No	Program / Kegiatan Utama			Anggaran (Rp)			Keluaran		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1779	003	Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan	729.662.000	729.142.000	99,93	.6 Desa	6 Desa	100
2	1781	001	Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan	403.000.000	402.499.400	99,88	250.000 batang	9.106.698 Batang	364
3		002	Pengembangan teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan	599.500.000	598.251.000	99,79	12 Paket	12 Paket	100
4		003	Fasilitasi Teknis Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan	407.420.000	403.500.000	99,04	12 Bulan	12 Bulan	100
5		950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1.904.142.000	1.881.955.580	98,83	12 Bulan	12 Bulan	100
6		951	Layanan Internal	1.250.000.000	1.238.000.000	99,12	1 layanan	1 layanan	100
7		994	Layanan Perkantoran	9.850.707.000	9.216.885.666	93,57	12 bulan	12 bulan	100
8									
				15.144.431.000	14.471.201.093	95,55			

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja BBPPTP Ambon tahun 2017 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dilaksanakan selama periode tahun 2017. Kegiatan yang terkait dengan fungsi pelayanan dalam rangka menjadikan BBPPTP Ambon sebagai Balai yang profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan. Kegiatan tersebut pada hakikatnya dilakukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.

B. Saran

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan Tupoksi BBPPTP Ambon, maka monitoring, evaluasi dan pemantauan secara berkala perlu dilakukan oleh Tim SPI. Pengawasan terhadap kinerja Tim SPI harus secara berkala dievaluasi oleh atasan langsung.

